

LANDASAN ONTOLOGIS SOSIALISME

Reno Wikandaru

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada
Email: renowikandaru@ugm.ac.id

Budhi Cahyo

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Sosialisme adalah ideologi yang beranggapan bahwa kepemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran. Sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Tugas negara adalah mengamankan sebanyak mungkin faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat, dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi. Sosialisme menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerja sama, dan kasih sayang. Produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Persaingan yang kompetitif digantikan dengan perencanaan. Setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi kontribusi pada kebaikan bersama sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain. Kedua, landasan ontologis yang mendasari sosialisme berkaitan dengan kodrat etis manusia; sifat kodrati manusia; dan harmoni tatanan masyarakat. Sosialisme berpendapat bahwa kodrat etis manusia adalah baik; sifat kodratinya adalah bersifat sosial; dan menganggap bahwa ada harmonitas atau keselarasan dalam tatanan masyarakat.

Kata-kata Kunci: ideologi, sosialisme, ontology, goodness, society, harmony

Abstract

Socialism is an ideology assumed that shared ownership is the best way of life. Socialism did not proposed any private property because it makes people selfish and destroy the community harmony. Socialism wants the organization of production by the state as a suggestion to remove poverty and exploitation.

Socialism proposed equal rights for all groups, and classes of people to enjoy prosperity, wealth and prosperity. The state has to secure as much as possible factor of production for the welfare of all the people, and not focused on personal well-being. Socialism assumes that the state is above public institutions that govern society selflessly. The key values in socialism is equality, cooperation, and compassion. The production is done on the basis of usability and not just for the profit. Competition replaced with planning. Every person working for the community and contribute to the common good so that it appears concern for others. Second, the underlying ontological foundation of socialism ideology associated with the ethical nature of man; human nature; and harmony of the society. The ideology of socialism found ethical nature of man is good; human nature is a social being; and assumes that there is harmony in the society.

Keywords: *ideology, socialism, ontology, goodness, society, harmony*

PENDAHULUAN

Ideologi adalah salah satu istilah yang memiliki cakupan yang luas karena istilah ideologi sesungguhnya dapat dibicarakan dalam banyak konteks. Ideologi dapat dibicarakan dalam konteks pendidikan, ilmu, dan tentu saja dalam konteks politik. Mengingat begitu luasnya cakupan istilah ideologi tersebut, penting karenanya untuk disampaikan di awal penelitian ini bahwa ideologi yang dikaji dalam penelitian ini adalah ideologi politik, yaitu ideologi yang menjadi landasan atau yang berkembang dalam praktek kehidupan politik.

Ideologi adalah satu istilah penting yang menjadi salah satu fokus pembicaraan dalam perbincangan tentang politik, atau dalam perbincangan yang terkait dengan kehidupan kenegaraan. Hal ini tidak lain disebabkan karena ideologi merupakan salah satu faktor penting dan sekaligus bersifat mutlak dalam rangka menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup satu bangsa atau negara. Ideologi, singkatnya, menjadi sumber nilai yang menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat, yang pada gilirannya menjadi pedoman tingkah laku warga negara melalui penjabaran dalam bentuk peraturan hukum. Ideologi, dapat juga difungsikan sebagai kepribadian suatu bangsa dan atau negara karena ideologi juga menunjukkan orientasi suatu masyarakat, yaitu terkait dengan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, persoalan ideologi memang jarang sekali dibicarakan karena secara umum perhatian dunia mengarah pada persoalan pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan stabilitas ekonomi global. Hal ini, namun demikian, tidak berarti persoalan ideologi menjadi hilang begitu saja. Disadari atau tidak, persoalan yang bersangkutan dengan ideologi masih ada, dan bahkan menjadi semakin krusial di masa globalisasi ini karena terjadinya “percampuran” bermacam-macam ideologi. Globalisasi telah membuka kran informasi sehingga segala hal yang berasal dari sumber asing bisa dengan mudah masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk salah satunya ideologi tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan, khususnya bagi masyarakat atau negara yang tidak memiliki basis ideologis kuat karena bisa menjadi rentan untuk terkontaminasi dengan berbagai ideologi yang berasal dari luar.

Berbicara tentang ideologi, ada berbagai macam ideologi yang berkembang dalam sejarah manusia. Liberalisme, sosialisme, komunisme, fasisme, adalah beberapa nama ideologi yang berkembang dalam sejarah umat manusia. Di antara ideologi-ideologi tersebut, ada ideologi yang berkembang menjadi ideologi besar dan dianut oleh banyak negara, namun ada juga ideologi yang tidak dianut oleh banyak negara sehingga tidak mampu bertahan dalam perkembangan dunia saat ini.

Di antara ideologi-ideologi yang dituliskan di atas, sosialisme adalah salah satu ideologi yang cukup berpengaruh dalam perkembangan politik internasional. Pada awal abad ke-19, sosialisme muncul sebagai alternatif bagi berkembangnya liberalisme dan kapitalisme yang bagi beberapa pihak dianggap tidak mampu mewujudkan kondisi ideal masyarakat. Ada sosialisme moderat yang menempuh cara-cara yang 'lunak' di dalam memperjuangkan idealismenya, namun ada pula sosialisme 'radikal' yang berusaha mewujudkan kondisi ideal masyarakat dengan cara revolusi. Meskipun pada akhirnya sosialisme tidak banyak dianut oleh negara di dunia, satu hal yang menarik bagi peneliti adalah bahwa ideologi ini sempat menjadi pusat perhatian dunia politik internasional, termasuk juga perhatian para pendiri

negara (*founding fathers*) Indonesia yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia.

Bertolak dari besarnya pengaruh sosialisme sebagaimana ditunjukkan dalam ilustrasi di atas, peneliti menganggap perlu untuk mengkaji sosialisme tersebut secara kritis dan radikal untuk melihat pemikiran-pemikiran yang melandasi sosialisme tersebut. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif karena karakteristik atau perbedaan satu ideologi dengan ideologi yang lain, sangat ditentukan oleh landasan filosofis ideologi tersebut, yang terdiri atas landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Landasan ontologis ideologi adalah asumsi ideologi tersebut tentang manusia, alam, dan cara kerja 'realitas', atau yang kadang disebut dengan istilah pandangan dunia (*world view*). Landasan epistemologi ideologi berkaitan dengan asumsi ideologi tentang kebenaran serta cara memperoleh kebenaran yang kemudian berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan negara penganut ideologi tersebut. Landasan aksiologis berkaitan dengan kategori nilai-nilai yang dianggap penting oleh sebuah ideologi yang kemudian mempengaruhi idealisme dan tujuan yang ingin dicapai oleh ideologi tersebut. Dari ketiga landasan filosofis tersebut, landasan ontologis adalah satu hal yang sangat menentukan bagi sebuah ideologi, karena ketika sebuah pemikiran dilandasi oleh pandangan dunia yang berbeda, tidak jarang memunculkan ideologi yang berbeda pula. Pandangan dunia, dengan kata lain merupakan salah satu kunci pembeda satu ideologi dengan ideologi yang lain. Pandangan dunia suatu ideologi, dengan kata lain merupakan landasan ontologis yang kemudian menjadi fundamen atau dasar bagi bangunan pemikiran dari ideologi tersebut. Melihat pentingnya landasan ontologis bagi sebuah ideologi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji landasan ontologis dari sosialisme untuk memahami asumsi-asumsi ontologis yang melandasi ideologi ini. Penelitian ini oleh karenanya akan menganalisis sosialisme dari sudut pandang ontologi, dengan harapan dapat ditemukan berbagai pemikiran yang menjadi latar belakang atau dasar bagi pandangan-pandangan di dalam sosialisme tersebut.

PENGERTIAN SOSIALISME

Sosialisme adalah salah satu ideologi yang berpengaruh besar dalam dunia politik internasional di sekitar abad ke-19. Menguraikan sosialisme ini, namun demikian bukanlah perkara yang mudah. Ian Adams, dalam bukunya yang berjudul *Ideologi Politik Mutakhir*, menuliskan bahwa dari semua ideologi, sosialisme mungkin yang paling sulit untuk diuraikan (Adams, 1993: 157). Kesulitan tersebut muncul karena sulitnya menentukan sosialisme yang 'sejati' karena pada perkembangannya ada banyak ragam sosialisme, termasuk di dalamnya sosialisme Marx-ian yang memiliki pengaruh sangat besar, bahkan hingga saat ini (Adams, 1993: 157). Terlepas dari persoalan tersebut, peneliti dalam hal ini akan tetap berusaha untuk memberi batasan yang sejelas-jelasnya tentang sosialisme yang dimaksud di dalam penelitian ini. Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang ideologi ini, akan diuraikan terlebih dahulu pengertian sosialisme dari tiga sudut pandang, yaitu sudut pandang etimologis, historis, dan terminologis. Dari ketiga sudut pandang tersebut, peneliti selanjutnya akan berusaha untuk menggali corak umum dari variasi-variasi sosialisme tersebut, sehingga didapatkan ciri-ciri pemikiran sosialisme yang selanjutnya akan dijadikan sebagai objek utama analisis dalam penelitian ini.

Secara etimologi, istilah sosialisme atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *socialism* berasal dari bahasa Perancis, yaitu "*so-sial*" yang berarti "kemasyarakatan". Secara historis, istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar tahun 1830. Umumnya sebutan itu dikenakan bagi aliran atau pandangan yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan pada hak milik bersama terhadap alat-alat produksi, dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba, semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Secara terminologi, istilah sosialisme dipahami secara bermacam-macam oleh para tokoh. Franz Magnis-Suseno misalnya, menulis bahwa sosialisme merupakan, (1) ajaran dan gerakan yang menganut-

nya bahwa keadaan sosial tercapai melalui penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, (2) Keadaan masyarakat di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi telah dihapus (Franz Magnis Suseno, 2001: 270). Selain itu ada juga Sosialisme Ilmiah yang diklaim oleh Karl Marx. Marx mengklaim bahwa sosialismenya adalah sosialisme ilmiah. Sosialisme ilmiah, sosialisme (dalam arti (1) yang mau memperlihatkan dengan meneliti hukum-hukum perkembangan masyarakat bahwa sosialisme (dalam arti (2)) pasti akan datang (Magnis Suseno, 2001: 270-271).

Sosialisme, di dalam *Encyclopedia of Social History* di definisikan sebagai "sebuah istilah yang mengacu pada sebuah pergerakan atau sebuah teori organisasi sosial yang menginginkan kepemilikan atau pengontrolan secara bersama-sama terhadap produksi dan distribusi. Sosialisme, pertama kali muncul sebagai reaksi atas berkembangnya industrialisme dan kapitalisme pada abad 19-20. Kebanyakan dari teoritis sosialisme menyarankan pentingnya kerja sama, perencanaan, dan kepemilikan publik, untuk melawan kompetisi dan pencarian laba individual sebagaimana digagas oleh kapitalisme (N. Stearns, 1994: 896). Definisi lain tentang sosialisme dapat juga dilihat dalam *Kamus Filsafat* karya Lorens Bagus, yang menyatakan bahwa istilah sosialisme menunjuk pada "asosiasi apapun, bisa pribadi (swasta) atau umum (pemerintah)". Salah satu ciri khas dari pemikiran sosialisme adalah pengendalian harta dan produksi serta kekayaan oleh kelompok (Bagus, 2002: 1030).

Secara historis atau dari segi sejarahnya, istilah sosialisme bukanlah istilah yang mudah untuk dilacak dalam sejarah. Ebenstein, dalam bukunya *Today's Isms, Communism, Fascism, Socialism, Capitalism*, menulis bahwa sebenarnya sulit untuk menentukan waktu yang tepat, kapan ide atau gagasan tentang sosialisme tersebut muncul. Ada yang menganggap bahwa ide tentang sosialisme sebenarnya sudah muncul dalam gagasan Plato sebagaimana tertulis dalam *Republic*; dan ada juga yang mengatakan bahwa ide sosialisme sebenarnya berasal dari Bibel, khususnya dari Kitab Perjanjian Lama. Cita-cita yang sekarang disebut dengan "sosialisme" itu sudah ditemukan dalam budaya Yunani kuno.

Kasta para filosof yang menurut Plato harus memimpin negara, tidak boleh mempunyai hak milik pribadi dan tidak berkeluarga, memiliki segalanya bersama dan hidup menurut aturan yang sama. Namun sosialisme ini terbatas pada kasta calon pemimpin. Masyarakat sendiri tertata secara hierarkis dan tentu saja bebas mempunyai hak milik (Magnis Suseno, 2001:14). Selain itu contoh masyarakat dalam kepemilikan bersama sudah dilakukan pada masa awal penganut Kristen, sistem seperti itu disebut “komunisme purba”. Hingga abad pertengahan para teolog Kristen pun sependapat bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Mulai dari zaman Stoa hingga abad pertengahan pemilikan bersama merupakan suatu kodrat dan keadaan alamiah, sedangkan pemilikan pribadi dianggap kemerosotan kehidupan manusia karena menurut filosof stoa, pada zaman emas semula hanya ada milik bersama. Pada awalnya munculnya motif kaum sosialis di abad pertengahan sangat berkaitan dengan religiusitas. Paham religius tidak dapat dipisahkan dari motif munculnya kaum sosialis abad pertengahan karena berkaitan erat dengan pertimbangan bahwa untuk menyambut kerajaan Allah, manusia harus bebas dari segala keterikatan. Motif tersebut mulai mengalami pergeseran saat memasuki zaman Renaissance. Pergeseran itu diawali dengan munculnya tulisan yang disebut “utopi” atau “utopis”.

Kemunculan sosialisme yang baru tersebut diasosiasikan dengan karya Thomas Moore, *Utopia* yang diterbitkan pada tahun 1516 di masa Renaissance (Ebenstein, 1965: 197). Gagasan Thomas Moore tersebut belakangan disebut dengan sosialisme klasik karena memang memiliki corak yang berbeda dengan sosialisme modern yang berkembang belakangan. Karl Marx, belakangan menyebut sosialisme ini dengan sosialisme utopis, yang dilawankan dengan gagasan sosialismenya sendiri, yang ia sebut dengan sosialisme ilmiah. Motivasi dasar di belakang cita-cita utopis itu bersifat sosial, dan tidak lagi religius: ada kesadaran akan keadaan buruk kelas-kelas bawah, keyakinan bahwa konflik-konflik sosial, ketidaksamaan dan penindasan bertentangan dengan kodrat manusia dan karena itu dengan kehendak Allah maupun dengan tatanan alam, dan bahwa semuanya itu adalah akibat hak milik

pribadi. Hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Cita-cita kaum utopis seperti penghapusan hak milik pribadi, kewajiban setiap orang untuk bekerja, penyamaan pendapatan dan hak semua orang, pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil tersebut selanjutnya akan menjadi cita-cita utama sosialisme modern (Magnis Suseno, 2001:16).

Berbeda dengan sosialisme klasik, sosialisme modern muncul sebagai reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami rakyat di bawah sistem kapitalisme liberal yang tamak. Sosialisme modern berkembang pada awal abad ke-19 sebagai respon terhadap pengaruh sosial industrialisasi yang terjadi di daratan Eropa. Bertolak belakang dengan perkembangan industri yang sangat pesat, kesejahteraan kaum pekerja justru menurun (Adams, 1993: 159-160). Kondisi buruk terutama dialami kaum pekerja atau buruh yang bekerja di pabrik-pabrik dan pusat-pusat sarana produksi dan transportasi. Sejumlah kaum cendekiawan muncul untuk membela hak-hak kaum buruh dan menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran. Mereka menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Orang pertama yang menyuarakan cita-cita masyarakat tersebut, yang akan menjadi acuan kaum sosialis aliran keras adalah Francois Noel Babeuf. Babeuf memaklumkan “perang kaum miskin melawan kaum kaya”. Nilai tertinggi Babouvisme, atau gerakan para pengikut Babeuf, adalah kesamaan. Merekalah yang pertama kalinya menyuarakan tuntutan-tuntutan inti komunisme di kemudian hari, seperti sosialisasi alat-alat produksi dan kediktatoran ploretariat (Magnis Suseno, 2001:20)

Meski ide-ide masyarakat sosialis sudah muncul sejak era Renaisans, abad pertengahan, dan bahkan sejak masa Yunani Kuno, namun demikian Robert Marcus Owen, adalah orang pertama yang menggunakan kata sosialisme. Dia dikenal sebagai pelopor sosialisme di Inggris. Dia adalah seorang pengusaha kapas yang kaya raya yang mengawali kariernya dengan menjadi seorang penjaga toko. Owen mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganti kompensasi mereka

kepada para buruh miskin dengan membangunkan sebuah perkampungan yang layak yang dilengkapi dengan unit industri yang bisa mereka gunakan untuk memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari mereka. Unit kerja ini berguna untuk melatih para buruh lebih mandiri dan tidak bergantung pada kaum kapitalis yang menguasai perindustrian.

Gagasan tersebut muncul karena adanya pandangan yang 'khas' tentang negara. Menurut mereka negara merupakan bentuk perpanjangan tangan dari kelas atas untuk menindas kelas bawah, sehingga negara secara hakiki merupakan negara kelas artinya negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas yang menguasai bidang ekonomi. Negara bukanlah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih, melainkan merupakan alat dalam tangan kelas-kelas atas untuk mengamankan kekuasaan mereka (Mag-nis Suseno, 2001: 120). Pada perkembangan berikutnya, gagasan tentang kejahatan kapitalisme, penderitaan kaum pekerja, negara, masyarakat tanpa kelas, dan berbagai gagasan sosialisme lainnya menginspirasi tokoh-tokoh sosialisme berikutnya. Tokoh sosialisme terbesar yang kemudian memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan sejarah ideologi adalah Karl Marx dengan rekannya, Frederick Engels, yang "menyarankan" perlunya revolusi untuk mewujudkan cita-cita sosialisme tersebut. Sejak kemunculan Marx, gagasan sosialisme berkembang menjadi komunisme. Meskipun komunisme sebenarnya hanya berbeda beberapa 'derajat' dengan sosialisme, namun demikian, pada penelitian ini batasan sosialisme merujuk pada sosialisme klasik dan modern non-Marxian. Hal ini dilakukan bukan untuk menutup perdebatan, namun menurut peneliti, komunisme sudah ada di wilayah ideologi lain di luar sosialisme, yaitu ideologi komunisme itu sendiri.

PEMIKIRAN TOKOH-TOKOH SOSIALISME

Gagasan atau ide-ide sosialisme adalah gagasan yang menarik perhatian banyak cendekiawan di Eropa sekitar abad 18-20. Bagian ini

selanjutnya akan menguraikan gagasan beberapa tokoh sosialisme klasik dan modern.

1. Francois-Emile Babeuf

Babeuf merupakan orang pertama yang menyuarakan cita-cita sosialisme dan akan menjadi acuan kaum sosialis garis keras. Francois Noel Babeuf merupakan anggota klub kaum Jakobin dari fraksi radikal dalam revolusi di Perancis. Babeuf memperlakukan perang kaum miskin melawan kaum kaya. Nilai tertinggi bagi pengikut Babeuf adalah kesamaan. Mereka mencita-citakan "republik orang-orang sama". Merekalah yang pertama kalinya menyuarakan tuntutan-tuntutan inti komunisme kemudian hari seperti sosialisasi alat-alat produksi dan kediktatoran proletariat. Produksi harus diatur bersama, hak milik pribadi dihapus, setiap orang diberi kegiatan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, tanah harus dinasionalisasi, tetapi diserahkan kepada kaum tani untuk digarap (Magnis Suseno, 2001:20-21). Para pengikut aliran Babeuf ini meyakini jika sistem ini dilakukan maka segala keburukan umat manusia dapat terselesaikan.

2. Robert Owen

Robert Owen adalah seorang ahli ekonomi serta pengusaha yang manusiawi dan sosial. Ia berpendapat bahwa tatanan industrial, sistem keuangan, upah dan pendidikan perlu direformasi karena dengan begitu ia meyakini reformasi itu tidak hanya menguntungkan kaum buruh namun juga kaum kapitalis sendiri. Menurut Owen watak manusia bukan tanggung jawabnya sendiri, melainkan ditentukan oleh lingkungan sosialnya. Sumber segala malapetaka sosial adalah ketidaktahuan, terutama mengenai kodrat manusia (Magnis Suseno, 2001: 20-21). Saat orang mengerti bahwa kebahagiaan dapat dicapai jika ia mengusahakan kebahagiaan orang lain, maka ia akan menyetujui perbaikan-perbaikan sosial yang diperlukan. Owen meyakini bahwa dengan keadaan sosial yang baik maka akan membentuk manusia-manusia yang baik pula.

Reformasi pendidikan harus juga disertai dengan reformasi sistem kerja. Para pengusaha sendiri berkepentingan agar buruh-buruh

mereka dapat hidup secara manusiawi. Saat kehidupan buruh lebih baik maka itu juga akan menguntungkan para pengusaha karena para buruh dapat membeli lebih banyak hasil produksi.

3. Blanqui

Louis Auguste Blanqui (1805-1881) adalah seorang revolusioner yang hendak mencapai cita-cita sosialisme melalui pemberontakan kaum buruh (Magnis Suseno, 2001:33). Latarbelakang pemikiran Blanqui terbentuk dari Jakobinisme dan Babouvisme. Blanqui berpendapat bahwa revolusi dapat berhasil jika ditunjang dengan organisasi revolusioner. Aliran Blanquisme merupakan pemberontakan rakyat yang terorganisir yang hasilnya adalah kediktatoran rakyat, yang akan mengambil alih kekuasaan kaum kaya dan mewujudkan kesamaan. Blanquisme ingin mencapai kemenangan sosialisme melalui pemberontakan bersenjata kelompok-kelompok kecil sebelum mayoritas rakyat berkembang menjadi proletariat industri.

4. Piere-Joseph Proudhon

Proudhon menyadari bahwa reformasi masyarakat mendasarkan pada ilmu ekonomi. Meskipun Proudhon tidak menyukai kondisi sosial masyarakat akibat perbedaan kelas, ia menolak komunisme dan sosialisme negara. Ia berpendapat bahwa ada sebuah tatanan masyarakat "alami" dan bahwa manusia sejak kelahirannya memiliki hak-hak azasi tertentu: yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan pribadi. Hak-hak itu diperkosa dalam sistem ekonomi kapitalisme yang dikuasai persaingan dan menghasilkan ketidaksamaan dan penghisapan (Magnis Suseno, 2001: 37).

Proudhon sebenarnya tidak menolak dengan hak milik pribadi namun ia menolak terhadap orang yang dapat memperoleh kekayaan tanpa bekerja. Proudhon tidak suka dengan segala pemberontakan dan pemogokan. Proudhon khawatir bahwa kekerasan terhadap pemilik modal akan menghasilkan kediktatoran dan anarki serta makin mempertajam pertentangan kelas. Proudhon hanya ingin menghapus hak milik besar yang menurutnya dianggap diperoleh dari hasil peng-

hisapan, sedangkan produsen kecil boleh tetap memegang miliknya karena diperoleh dari hasil pekerjaannya sendiri.

Yang perlu dihapus adalah utang dan bunga atas utang. Untuk itu perlu didirikan bank-bank rakyat. Dari mereka produsen kecil dapat memperoleh kredit tanpa bunga. Para produsen kecil saling menukarkan produksi lewat koperasi menurut nilai produk yang mereka tentukan oleh waktu kerja yang masuk (Magnis Suseno, 2001:39). Oleh karena pemikirannya tersebut maka Proudhon termasuk tokoh yang diperhitungkan di kalangan anarkisme.

PANDANGAN POKOK SOSIALISME

Sebagaimana dikemukakan di atas, sebenarnya tidak mudah untuk merangkum berbagai pandangan dari tokoh-tokoh sosialisme di atas guna menemukan pandangan sosialisme 'sejati'. Pandangan pokok sosialisme, namun demikian tetap perlu untuk diuraikan dalam penelitian ini guna memberikan batasan yang jelas tentang objek material yang menjadi bahasan penelitian ini. Bertolak dari uraian sebelumnya, peneliti oleh karenanya berusaha merangkum pandangan pokok atau ciri-ciri pandangan sosialisme.

- a. Sosialisme beranggapan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali.
- b. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami.
- c. Sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil.
- d. Sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran.
- e. Sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi.
- f. Tugas negara adalah mengamankan sebanyak mungkin faktor pro-

- duksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat, dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi.
- g. Sosialisme menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih.
 - h. Sosialisme menganggap bahwa kapitalisme memiliki sifat yang jahat, yaitu: kapitalisme menghasilkan sistem kelas; kapitalisme adalah sistem yang tidak efisien; dan kapitalisme merusak sifat manusia karena cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam.
 - i. Nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerja sama, dan kasih sayang.
 - j. Produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata.
 - k. Persaingan yang kompetitif digantikan dengan perencanaan.
 - l. Setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi kontribusi pada kebaikan bersama sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain.

Inilah beberapa karakter sosialisme yang dapat dirangkum dari uraian di atas. Sosialisme berusaha untuk merealisasikan gagasan di atas dalam level realitas melalui berbagai tindakan, baik tindakan politik maupun tindakan ekonomi, dalam bentuk sistem ekonomi sosialis. Pandangan-pandangan itulah yang kemudian akan menjadi pijakan bagi analisis berikutnya, yakni tentang landasan ontologis yang melandasi berbagai pandangan sosialisme tersebut.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP LANDASAN ONTOLOGIS

Semua pengetahuan, baik yang berwujud ilmu, seni, filsafat, maupun dalam wujud yang lain, pada dasarnya memiliki tiga landasan, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis (Suriasumantri, 1991: 9; Tim Dosen Filsafat Ilmu, 2010: 90). Term "landasan ontologis" sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, sebenarnya term yang biasanya muncul dalam kajian filsafat ilmu. Landasan ontologis ilmu menentukan cara pandang ilmu tersebut

terhadap realitas yang menjadi objek kajian dari masing-masing ilmu. Persoalan landasan ontologis ilmu meliputi hakikat ilmu, hakikat kebenaran, dan hakikat realitas, yang kemudian akan menentukan landasan epistemologis ilmu tersebut, yang berperan sebagai metode, sarana, tata cara yang dikembangkan di dalam mengkaji realitas sebagai objek material. Term “landasan ontologis” sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, tentunya tidak sama persis dengan batasan landasan ontologis sebagaimana dimaksud dalam filsafat ilmu tersebut. Landasan ontologis dalam penelitian ini akan dibicarakan dalam konteks kajian filsafat politik sehingga landasan ontologis dalam kajian ini akan bersangkutan dengan objek dari politik itu sendiri, yaitu manusia. Landasan ontologis, dalam penelitian ini oleh karenanya akan banyak membahas tentang kedudukan manusia dalam konteks politik.

Guna memberikan gambaran yang komprehensif tentang maksud dari kajian ontologis sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, peneliti dalam hal ini akan terlebih dahulu menguraikan tentang ontologi secara umum, mulai dari pengertiannya, ruang lingkup persoalannya, dan kaitannya dengan kajian politik.

Pengertian Ontologi

Secara etimologis, istilah ontologi, yang dalam bahasa Inggris disebut *ontology*, adalah bentukan dari dua kata, yakni “*ontos*” dan “*logos*”. Istilah “*ontos*” adalah bentuk genitif dari kata Yunani “*on*”, dan bentuk netral dari kata tersebut adalah “*oon*”. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “*to on hei on*” yang berarti “yang-ada sebagai yang-ada” (Siswanto, 2004: 2). Kata Yunani “*logos*” sering diartikan sebagai “tuturan” atau “ilmu”. Berdasarkan arti dari dua kata tersebut, ontologi bisa diartikan sebagai ilmu atau kajian mengenai yang-ada sebagai yang-ada (*a being as being; being qua being*). Menurut Bakker, ontologi bisa diartikan sebagai kajian atau ilmu yang mempelajari tentang “yang-ada yang umum”, sesuai dengan makna kata “*ontos*” sebagai bentuk generatif dari “*on*” di atas (Bakker, 1992: 16).

Secara historis, Christian Wolff (1679-1754) adalah tokoh yang memperkenalkan istilah “ontologi”. Wolff, di dalam bukunya *Ontolo-*

gy, membagi filsafat ke dalam dua bagian, yakni filsafat praktis dan filsafat teoritis. Filsafat praktis dibagi ke dalam tiga bagian, yakni etika, ekonomi, dan politik; sedangkan filsafat teoritis, yang disebut dengan metafisika, dibagi ke dalam dua bagian, yakni metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum disebut dengan istilah “ontologi”, sedangkan metafisika khusus dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yakni psikologi rasional (*rational psychology*), kosmologi (*cosmology*), dan teologi natural (*natural theology*) (Copleston, 1968: 108). Sesuai dengan klasifikasinya tersebut, ontologi merupakan ilmu yang menelaah “yang-ada sebagai yang-ada” dengan perspektif yang lebih luas, sesuai dengan nama yang ia gunakan, yakni metafisika umum (Siswanto, 2004: 4).

Secara terminologis, istilah ontologi dipahami secara bermacam-macam oleh para tokoh. Bakker di dalam *Ontologi atau Metafisika Umum* (1992), mendefinisikan istilah ontologi sebagai cabang filsafat yang menyelidiki dan menggelar gambaran umum tentang struktur realitas yang berlaku mutlak dan umum. Definisi ini menyiratkan sekaligus dua fokus kajian ontologi. Pertama adalah kajiannya mengenai struktur realitas; dan kedua adalah mengenai “hukum-hukum” realitas yang dimaksudkan tersebut, yakni menyangkut keadaan dan dinamika yang dialaminya. Sebanyak apapun definisi yang dikemukakan, ontologi tetap saja merupakan kajian atau ilmu yang dipahami secara berbeda-beda. Apabila ditarik pada tataran yang lebih umum, ada persamaan yang bisa diambil dari definisi yang berbeda-beda tersebut, yakni menyangkut objek material dan formal dari ontologi tersebut. Berkaitan dengan objek material, tentunya bisa disepakati bahwa objek kajian ontologi adalah “segala yang-ada”. Sedangkan berkaitan dengan objek formal ontologi, “segala yang-ada” tersebut di analisis hingga ditemukan sisi-sisi terdalam atau hakikatnya.

Keterkaitan Ontologi dengan Kajian Politik

Berdasarkan uraian tentang pengertian ontologi di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah “ontologis” bersangkutan dengan makna “hakikat realitas”. Hal ini tidak lain berkaitan dengan sifat dan karakter kajian ontologi itu sendiri yang sebagaimana dikemukakan oleh

Bakker, adalah cabang filsafat yang berusaha menggelar gambaran umum tentang struktur realitas yang berlaku mutlak dan umum. Makna dari istilah landasan ontologis sebagaimana dimaksud dalam pengertian ini, oleh karenanya sangat dipengaruhi oleh makna ontologis sebagaimana di atas. Landasan ontologis sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, oleh karenanya adalah landasan yang berkaitan dengan asumsi suatu ideologi tentang realitas yang menjadi pijakan dari ideologi tersebut.

Pernyataan di atas setidaknya memiliki konsekuensi yang serius karena istilah 'realitas' dapat dipahami setidaknya dalam dua makna. *Pertama*, realitas dapat dimaknai sebagai 'dunia seisinya', atau dalam kajian politik dikenal dengan *world view*, yaitu pandangan tentang dunia sebagaimana tersirat dalam pandangan sebuah ideologi. Landasan ontologis sosialisme dalam arti yang pertama ini, oleh karenanya bersangkutan dengan pandangan sosialisme tentang dunia dengan berbagai dinamikanya. Pertanyaan yang dapat diajukan di sini misalnya, menurut sosialisme, apakah dunia ini teratur, ataukah sebaliknya?; apakah yang menjadi prinsip pertama realitas menurut sosialisme?

Kedua, kata realitas dalam pernyataan di atas, dapat juga dimaknai pada ruang lingkup yang lebih sempit. Perlu diingat bahwa membicarakan tentang ideologi, maka akan berkaitan dengan negara; dan berbincang tentang negara, maka akan berbincang pula tentang manusia karena sesungguhnya yang menegara itu adalah manusia. Dari penjelasan tersebut, karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa penjelasan tentang landasan ontologis sosialisme tersebut, nantinya akan membahas pandangan sosialisme tentang hakikat manusia. Pertanyaan yang dapat dikemukakan misalnya adalah, apakah kodrat manusia itu baik, atau jahat?; apakah manusia pada dasarnya memiliki sifat individual atau sosial?; dan lain sebagainya.

Melihat dua konsekuensi di atas, dapat dilihat bahwa kajian ontologis sangat berkaitan dengan kajian tentang politik. Kembali kepada sistematika metafisika sebagaimana dikemukakan oleh Wolff, yang membagi metafisika menjadi empat cabang, yaitu ontologi, kosmologi, psikologi rasional, dan teologi natural, dapat dilihat bahwa ontologi dan kajian politik sebenarnya memiliki objek yang sama, yaitu manu-

sia. Ontologi memberikan kontribusi yang sangat penting bagi kajian politik, termasuk salah satunya kajian tentang ideologi ini karena ontologi membantu menelusuri landasan ontologis yang melatarbelakangi suatu aliran politik, salah satunya sosialisme ini. Meneliti landasan ontologis dari suatu pemikiran politik akan sangat membantu di dalam memahami pemikiran tersebut secara lebih komprehensif karena melalui kajian ontologis semacam ini, akan didapatkan pengetahuan yang sifatnya radikal, dalam arti akar persoalan yang sebenarnya. Inilah keterkaitan antara kajian ontologi dengan kajian politik sebagaimana terlihat dalam penelitian ini.

ASUMSI ONTOLOGIS SOSIALISME

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, semua pengetahuan, baik yang berwujud ilmu, seni, filsafat, maupun dalam wujud yang lain, pada dasarnya memiliki tiga landasan, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis (Suriasumantri, 1991: 9; Tim Dosen Filsafat Ilmu, 2010: 90). Landasan ontologis berkaitan dengan asumsi pengetahuan tentang realitas yang dikaji oleh pengetahuan tersebut. Dalam konteks kajian tentang ideologi, landasan ontologis tersebut setidaknya berkaitan dengan dua persoalan. *Pertama*, landasan ontologis bersangkutan dengan pandangan ideologi tentang dunia dengan berbagai dinamikanya; dan *kedua*, bersangkutan dengan pandangan ideologi tentang hakikat manusia. Sebagai sebuah hasil pemikiran manusia, sosialisme tentunya juga memiliki asumsi ontologis. Bab V ini, selanjutnya akan menguraikan temuan peneliti tentang landasan ontologis yang melatarbelakangi sosialisme ini.

Pandangan Sosialisme Tentang Kodrat Etis Manusia

Sebuah ideologi pasti mempunyai landasan filosofis; dan satu ideologi dapat berbeda dengan ideologi yang lain bisa disebabkan karena memiliki landasan ontologis yang berbeda, landasan epistemologis yang berbeda, landasan aksiologis yang berbeda, atau bahkan ketiga-ketiganya. Kaitannya dengan landasan ontologis, satu pertanyaan penting yang kemudian akan menentukan 'karakter' dari sebuah ideologi berikut semua bangunan yang diusung oleh ideologi terse-

but, adalah pertanyaan yang sederhana, namun tidak mudah untuk dijawab, yaitu: apakah kodrat manusia itu bersifat baik ataukah jahat? Peneliti menyebut persoalan ini sebagai persoalan tentang kodrat etis manusia. Penyebutan ini dilatarbelakangi oleh satu pertimbangan bahwa persoalan tentang baik, buruk, jahat, dalam kajian filsafat termasuk dalam bidang kajian etika. Sehingga dengan menggunakan istilah 'kodrat etis' harapan peneliti adalah maksud bahwa persoalan ini berkaitan dengan kodrat manusia sebagai baik atau jahat, sudah dapat dipahami.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sosialisme adalah ideologi yang memiliki pemikiran yang khas. Sosialisme beranggapan bahwa kepemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Hak milik pribadi tidak disukai di dalam sosialisme karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme juga mengkritik kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang jahat karena kapitalisme menghasilkan sistem kelas; kapitalisme adalah sistem yang tidak efisien; dan kapitalisme merusak sifat manusia karena cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam. Bagi sosialisme, nilai-nilai yang semestinya harus dikembangkan dalam kehidupan adalah kesamaan, kerja sama, dan kasih sayang.

Mencermati beberapa pandangan sosialisme tersebut, dapat dilihat bahwa pandangan-pandangan tersebut bersandar pada asumsi tentang kodrat etis manusia. Pertanyaan: apakah manusia itu pada dasarnya bersifat baik atau jahat?; sosialisme menjawabnya dengan asumsi bahwa manusia itu pada kodratnya bersifat baik. Asumsi ini dibangun dengan sangat kuat, diyakini sebagai benar, yang kemudian menjadi pijakan bagi sosialisme di dalam mentransformasikan ide-idenya ke dalam tataran praksis. Penjelasan yang dapat disampaikan di sini untuk memperkuat argumen peneliti setidaknya ada dua, *pertama*, adalah pada pandangan sosialisme tentang keburukan kapitalisme; dan *kedua* adalah pada pandangan sosialisme tentang nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam kehidupan.

Bagi sosialisme, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang merusak sifat manusia karena kapitalisme cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam. Kata “merusak” menunjukkan bahwa kondisi kodrat manusia sebelum munculnya kapitalisme sebenarnya adalah baik. Ketika kapitalisme berlaku, 'kebaikan' manusia itu seketika 'rusak' karena manusia menjadi tamak, egois, dan kejam. Ian Adams, menegaskan asumsi sosialisme tentang 'kebaikan' manusia tersebut dengan mengatakan bahwa sosialisme berpegang pada asumsi bahwa karakter manusia pada dasarnya baik dan bahwa kejahatan dunia seperti kemiskinan, kejahatan, kekejaman, kebodohan, dan perang, tidak disebabkan oleh kejahatan yang inheren dalam diri manusia tetapi dikarenakan oleh kerja sistem yang ada (Adams, 2004: 165). Dari pandangan tersebut, secara implisit dapat diketahui bahwa sosialisme menganggap bahwa kejahatan yang tampak dalam kehidupan manusia selama ini bukan disebabkan oleh faktor internal dalam diri manusia, tetapi karena lingkungan yang didiami manusia tersebut, yang tidak lain adalah sistem kerja yang memaksa manusia untuk 'keluar' dari kodratnya.

Asumsi di atas, membawa konsekuensi logis yang panjang karena berpijak dari asumsi tersebut, dapat ditemukan asumsi lebih lanjut yang muncul sebagai konsekuensi dari asumsi pertama. Sosialisme menganggap bahwa kelaparan, kekurangan makanan, dan kemiskinan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya juga disebabkan karena 'sistem'. Sosialisme seolah yakin bahwa apabila ekonomi mampu disusun dengan perencanaan yang tepat akan ada kelimpahan untuk semua orang (Adams, 2004: 165).

Selain melihat kritik sosialisme atas kapitalisme di atas, penjelasan lain tentang asumsi kodrat etis manusia menurut sosialisme tersebut juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang direkomendasikan untuk dikembangkan oleh sosialisme. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bagi sosialisme, nilai-nilai yang semestinya harus dikembangkan dalam kehidupan adalah kesamaan, kerja sama, dan kasih sayang. Dari nilai-nilai tersebut dapat dilihat bahwa sosialisme melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki kodrat baik. Kerja sama dan kasih sayang, sebagaimana digagas oleh sosialisme sebagai nilai utama da-

lam kehidupan tersebut, tidak akan terjadi manakala masing-masing individu menutup diri atas kondisi orang lain. Kerja sama tidak akan terjadi ketika tidak ada kepentingan bersama, atau minimal kepedulian terhadap kepentingan orang lain; sedangkan kasih sayang tidak akan muncul kecuali di dalam hati masing-masing individu muncul dorongan untuk menghargai manusia yang lain. Hal ini menguatkan argumen bahwa agar dua nilai tersebut dapat berkembang dengan baik, harus diasumsikan bahwa setiap manusia memiliki kepedulian dan menyayangi manusia yang lain, sehingga dengan kata lain, dapat ditegaskan kembali bahwa sosialisme menganggap manusia pada dasarnya bersifat baik. Inilah asumsi pertama yang menjadi latar belakang atau landasan ontologis sosialisme.

Pandangan Sosialisme tentang Sifat Kodrati Manusia

Satu pertanyaan lainnya, yang dapat digunakan untuk menggali landasan ontologis sosialisme adalah pertanyaan tentang sifat kodrati manusia. Pertanyaannya adalah: apakah manusia pada dasarnya bersifat individual atautakah sosial? Jika manusia diasumsikan bersifat individual, maka akan lebih tepat jika sebuah negara menganut ideologi yang mengembangkan nilai-nilai individualistik. Sebaliknya, jika manusia diasumsikan bersifat sosial, maka akan lebih tepat jika sebuah negara menganut ideologi yang menjaga sosialitas manusia tersebut.

Pertanyaan tentang sifat kodrati manusia ini sebenarnya bukan pertanyaan yang baru, khususnya dalam kajian filsafat. Ribuan tahun yang lalu, filsuf Yunani Kuno, Aristoteles, sudah mengkaji pertanyaan tersebut ketika ia mengutarakan pemikirannya tentang negara. Bagi Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon* atau 'hewan yang bermasyarakat', yang secara tidak langsung mengandung makna bahwa manusia pada dasarnya harus bersosialisasi atau bermasyarakat dengan manusia yang lain. Alasan klasik tentang hal ini adalah bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa menjalin relasi dengan manusia-manusia yang lain.

Asumsi yang sama juga dapat dijumpai dalam sosialisme. Sosialisme, dengan kata lain juga berpijak pada asumsi ontologis bahwa

manusia pada hakikatnya bersifat sosial. Manusia, dalam kehidupan sehari-harinya selalu bergaul dengan sesama manusia. Dalam kehidupannya di dunia, ia berbagi bumi yang sama, tanah yang sama, air yang sama, dan sebagainya. Asumsi ini memiliki implikasi yang sangat luas di bidang ekonomi karena ketika 'kesamaan' dijadikan sebagai satu nilai utama, tidak alasan individu atau perseorangan untuk menguasai faktor-faktor produksi. Sedapat mungkin, sebanyak mungkin, berbagai faktor produksi tersebut dikelola secara bersama-sama, untuk kemanfaatan bersama, dalam prinsip keadilan ekonomi. Sosialisme beranggapan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Hak milik pribadi oleh karenanya menjadi satu hal yang terlarang, karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Oleh karena manusia adalah makhluk sosial, maka eksistensinya akan sangat tergantung pada eksistensi orang lain. Kondisi ini harus disadari betul oleh setiap orang sehingga pada akhirnya setiap manusia akan mendapat perlakuan yang sama, dalam segala hal. Sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran.

Argumen lain yang juga dapat digunakan untuk memperkuat temuan bahwa sosialisme menganggap manusia sebagai makhluk sosial adalah dari perlunya individual bergaul dengan komunitas. Ide ini tampak misalnya dalam pemikiran sosialisme modern yang mengemukakan pentingnya revolusi untuk merubah tatanan sosial akibat adanya kapitalisme. Tanpa persekutuan, mustahil revolusi akan terjadi. Individu mendapatkan artinya dengan bersatu dengan kelompok, sebaliknya kelompok menjadi solid dan kuat karena dukungan dan kepentingan yang sama dari individu-individu yang ada di dalamnya. Inilah landasan ontologis kedua dari sosialisme, yaitu bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial.

Pandangan Sosialisme tentang Harmoni Tatanan Masyarakat

Satu hal lain yang perlu disampaikan terkait dengan landasan ontologis sosialisme adalah pandangannya tentang tatanan masya-

rakat. Sebuah ideologi politik diterapkan tentu untuk menata masyarakat, atau untuk menjaga kelestarian tatanan masyarakat. Mengetahui tatanan masyarakat secara tepat akan sangat menentukan tepat dan tidaknya penerapan ideologi kepada masyarakat tersebut. Kapitalisme misalnya, menganggap bahwa tatanan masyarakat pada dasarnya digerakkan oleh kompetisi sehingga sedapat mungkin individu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensinya guna mencapai kondisi semaksimal yang ia bisa di dalam kompetisi yang ada.

Sebagai sebuah ideologi yang memiliki corak yang berbeda, sosialisme memandang masyarakat dalam perspektif berbeda. Para pemikir sosialisme, khususnya sosialisme klasik, menganggap bahwa di dalam masyarakat sesungguhnya telah ada keselarasan yang alami. Artinya, di dalam masyarakat sebetulnya telah ada keharmonisan alami yang sebenarnya hanya perlu dijaga saja, supaya keadaan ini berubah menjadi kekacauan. Asumsi ontologis tentang harmonitas tatanan masyarakat ini dapat dilihat dari pandangan sosialisme yang mengatakan bahwa hak milik hanya akan menimbulkan egoisme, yang pada akhirnya hanya akan merusak tatanan alami masyarakat.

Bertolak dari pandangan di atas, bahaya terbesar yang dapat mengancam tatanan alami masyarakat adalah egoisme individual. Namun demikian, perlu diingat bahwa bagi sosialisme, egoisme individual tersebut bukan muncul karena dorongan internal diri manusia. Sistem kapitalisme-lah yang telah mengubah manusia menjadi egois. Sistem kapitalis cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam yang pada gilirannya akan merusak kondisi kodrat manusia yang baik dan bersifat sosial, menjadi jahat, licik, egois, dan individual. Inilah asumsi ontologis sosialisme tentang keselarasan tatanan masyarakat.

Demikianlah tiga hal yang dapat diuraikan berkaitan dengan landasan ontologis sosialisme. Ketiga hal di atas tentu saja bukan tanpa kritik karena apabila ingin direfleksikan secara kritis, banyak kritikan yang dapat disampaikan, bahkan terhadap kekuatan asumsi sosialisme yang menjadi pijakan bangunan sosialisme itu sendiri. Hal ini, namun demikian tidak akan disampaikan dalam penelitian ini karena

tentu memerlukan kajian yang lebih spesifik, mendalam, namun komprehensif.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, sosialisme beranggapan bahwa kepemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran. Sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. tugas negara adalah mengamankan sebanyak mungkin faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat, dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi. Sosialisme menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Sosialisme menganggap bahwa kapitalisme memiliki sifat yang jahat, yaitu: kapitalisme menghasilkan sistem kelas; kapitalisme adalah sistem yang tidak efisien; dan kapitalisme merusak sifat manusia karena cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam. Nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerja sama, dan kasih sayang. Produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Persaingan yang kompetitif digantikan dengan perencanaan. Setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi kontribusi pada kebaikan bersama sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain.

Kedua, landasan ontologis yang mendasari sosialisme berkaitan dengan kodrat etis manusia; sifat kodrati manusia; dan harmoni tatanan masyarakat. Sosialisme berpendapat bahwa kodrat etis manusia adalah baik; sifat kodratinya adalah bersifat sosial; dan menganggap bahwa ada harmonitas atau keselarasan dalam tatanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Ian, 1993, *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Alih Bahasa Ali Moerzaman, Penerbit Qalam, Yogyakarta.
- Bagus, Lorens, 2005, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bakker, Anton, 1992, *Ontologi Atau Metafisika Umum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London & New York,
- Copleston, F., 1968, *A History of Philosophy, Vol. VI, Wolff to Kant*, Burns and Oates Limited, London.
- Darity Jr., William A., 2008, *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Macmillan Reference, New York.
- Ebenstein, 1965, *Today's Isms, Communism, Fascism, Socialism, Capitalism*, Fourth Printing, Prentice-Hall, Inc., Engelwood Cliffs.
- Fink, Hans, 2010, *Filsafat Sosial, dari Feodalisme hingga Pasar Bebas, Terjemahan Sigit Djatmiko, Cet. ke-12*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta
- Magnis-Suseno, Franz, 2001, *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- N. Stearns, Peter (Editor), 1994, *Encyclopedia of Social History*. Garland Publishing, Inc., New York and London.
- Siswanto, Joko, 2004, *Metafisika Sistematis*, Taman Pustaka Kristen, Yogyakarta.
- Suriasumantri, Jujun S., 1991, *Ilmu dalam Perspektif*, Gramedia, Jakarta.
- Tim Dosen Filsafat Ilmu, 2010, *Filsafat Ilmu*, Cetakan ke-5, Liberty, Yogyakarta.